

Pengawasan Produk, Sertifikasi Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Identifikasi Masalah	Upaya
Kebijakan belum dapat dipahami dengan baik secara administrasi maupun teknis.	Penyusunan dan perbaikan regulasi teknis sesuai kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha di bidang produksi dan distribusi Kefarmasian dan Alkes.
Kerangka pikir birokrasi belum berorientasi pada kemudahan proses investasi yang diikuti dengan pembinaan dan pengawasan standar dan persyaratan.	Sosialisasi regulasi teknis di bidang produksi dan distribusi Kefarmasian dan Alkes dan pengawalan oleh K/L terhadap standar dan persyaratan sertifikasi produksi dan distribusi Kefarmasian dan Alkes.
Peran Dinkes Provinsi dan Kabupaten/Kota belum optimal dalam pelaksanaan monitoring sarana produksi dan distribusi Kefarmasian dan Alkes pasca pelaksanaan investasi.	Memanfaatkan sistem <i>Online Single Submission (OSS)</i> yang terintegrasi dengan sistem pemantauan dan pengawasan sarana produksi dan distribusi Kefarmasian dan Alkes berbasis risiko secara elektronik.